

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila kemudian terjadi perceraian/pemutusan perkawinan.

Adanya berbagai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan menyangkut masalah perkawinan hingga perceraian mengandung maksud agar setiap orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tidak hanya menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan jasmaniah saja.

Setidaknya dengan adanya aturan perundangan yang mengatur masalah perkawinan dapat diperhatikan beberapa hal sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meliputi ;<sup>1</sup>

Pertama, Perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Hal: 45.

jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh. Dimensi masa dalam definisi ini dieksplisitkan dengan kata-kata bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, dalam Undang-Undang No. 1/1974, tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Dengan demikian dalam Undang-Undang perkawinan No. 1/1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga. Sedangkan dalam fikih tujuan perkawinan tidak dicantumkan. Perkawinan hanya dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. Penting untuk diketahui bahwa fikih hanya mengurus hal-hal yang praktis (amaliyah) bukan berbicara yang ideal.

Ketiga, terkesan dalam Undang-Undang No. 1/1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya sebuah perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit perceraian. Sedangkan dalam Islam kata kekal terlebih lagi dalam konteks hubungan sosial, seperti perkawinan tidaklah dikenal. Kendatipun Islam itu membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka

peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syari'at.

Dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula mengenai masalah hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. Pertama, mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kedua, mengatur tentang kebalikannya, yakni pada ketentuan Pasal 46 Undang-undang Perkawinan bahwa kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu: anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>2</sup>

Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah “kekuasaan orang tua” (*ouderlijkemacht*). Kekuasaan orang tua ini penting artinya bagi kehidupan seorang anak terutama yang belum dewasa karena melalui lembaga hukum ini hak-hak dasar anak akan dipenuhi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sudarsono, 2004, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 188.

<sup>3</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan)*, Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994. Hal: 37.

Keberadaan anak sebagai salah satu anggota dalam suatu keluarga pada dasarnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, dimana telah menjadi tanggung jawab atau kewajiban orang tua dalam hal pemenuhan kebutuhan anak mereka, yaitu berupa pemeliharaan dan pendidikannya. Sesuai pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, sebagai berikut:

- “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”<sup>4</sup>.*

Seringkali di kemudian hari ditemukan suatu keadaan ketika keharmonisan suatu keluarga tidak dapat lagi dipertahankan atau dalam arti kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh sang ayah dan ibu yang telah berlangsung sekian waktu, di kemudian hari timbul suatu permasalahan atau konflik dimana memang tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui perdamaian juga tidak menuai hasil, serta upaya keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, mereka benar-benar tidak dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan keluarga tersebut. Maka, pilihan terakhir

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, yang pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Adapun ketentuan tentang penyelesaian masalah perceraian mengenai sebab-sebab atau alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu pengajuan baik permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian haruslah pula berpedoman pada aturan perundangan, hal inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang penting bagi Hakim yang mana harus jeli dalam hal memberikan pertimbangannya dalam memutus sebuah perkara perceraian.

Namun, tidak hanya melihat atau memperhatikan pada sebab-sebab ataupun alasan yang mendasari putusnya suatu hubungan perkawinan, tetapi juga Hakim perlu untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang berperkara mengenai akibat-akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari, mulai dari masalah harta benda hingga yang menyangkut kewajiban mereka (orang tua) yang tidak begitu saja ikut putus/berakhir terhadap anak-anaknya.

Perpisahan dan perceraian menimbulkan masalah bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Anak-anak juga mengalami banyak perubahan dalam hidup mereka setelah orang tuanya bercerai. Yang terpenting, mereka memiliki perasaan dan hal ini jarang diperhatikan oleh orang-orang dewasa. Orang tua mereka mungkin adalah orang tua yang

sangat baik tetapi sangat lelah emosinya atau terganggu untuk dapat mengerti kebutuhan anak-anak mereka di sekitar waktu perpisahan.<sup>5</sup>

Dalam hal terjadinya suatu perceraian, tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi anak yang menyangkut masalah biaya hidup dan pemeliharaan anak sebagai korban perceraian tersebut. Ketika suatu ikatan perkawinan telah putus, maka hubungan hukum yang ada diantara kedua orang tua dan anak tidak begitu saja berakhir, karena tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan dan menurut ketentuan Pasal 300 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang melaksanakan kekuasaan orang tua adalah bapak. Mengenai hal ini pula telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai biaya pemeliharaan, pendidikan dan penafkahan anak setelah terjadinya perceraian, pengadilan yang memutus perceraian tersebut dapat membebankan suatu kewajiban kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan baik bagi anaknya maupun bekas isterinya. Biaya penghidupan dan pemeliharaan anak inilah yang kemudian disebut hak alimentasi anak/hak hadhanah.

Hadhanah atau dikenal dengan nama Hak Alimentasi Anak yaitu kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan

---

<sup>5</sup> Ann Mitchell, 1991, *Dilema Perceraian*, Jakarta: Penerbit Arcan. Hal: 71.

sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.<sup>6</sup>

Menurut ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>7</sup>

Menyadari demikian pentingnya kedudukan anak dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Undang-Undang telah mengatur hak-hak anak, bukan hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi masih ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hak-hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.

---

<sup>6</sup> Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres. Hal: 235.

<sup>7</sup> H.M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 115.

Akan tetapi dalam berbagai putusan Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Surakarta menunjukkan variasi antara putusan yang menghukum dan tidak menghukum orang tua untuk memberikan biaya alimentasi anak/hadhanah. Disamping itu, masih banyak orang tua setelah perceraian tidak mematuhi dan melaksanakan putusan Pengadilan Agama yang menghukum orang tua tersebut untuk memberikan biaya alimentasi/hadhanah serta memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak-anaknya.

Memperhatikan fenomena di atas, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh dalam penelitian yang berjudul **Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat. Selain itu, perumusan masalah diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian?



2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, dapat dijadikan sebagai upaya untuk menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi dalam bidang hukum perdata mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

## 2. Bagi Dunia Peradilan

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian sebagai dasar bagi Pengadilan Agama di Indonesia dalam meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang senantiasa menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum.

## 3. Bagi Masyarakat

a. Memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait tentang masalah perkawinan terutama mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di lingkup Surakarta pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai cara berfikir, cara bertindak juga dalam mengambil keputusan guna mewujudkan keadilan dalam memberikan hak alimentasi/hadhanah untuk anak-anaknya.

## 4. Bagi Ilmu Pengetahuan

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal pengembangan Ilmu Hukum, terutama di bidang Hukum Perkawinan Indonesia.

- b. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.<sup>8</sup> Dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu Tinjauan Yuridis tentang Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Perceraian terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum

---

<sup>8</sup> Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research, Jilid I cet. Ke-24*, Yogyakarta: Andi Offset. Hal: 4.

sebagai intitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.<sup>9</sup>

Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh permasalahan harus mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diperoleh jawaban secara tuntas. Sedangkan pendekatan secara empiris dimaksudkan memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Dalam melakukan penelitian ini, dengan cara mendasarkan permasalahan yang hendak dikaji yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak hadhanah dihadapkan pada berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang akan diteliti.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan,

---

<sup>9</sup> Roni Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal: 34.

<sup>10</sup> Winarno Surahman, 1989, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung: Tarsito. Hal: 26.

disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.<sup>11</sup>

Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang, sehingga dengan menggunakan metode deskriptif ini diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

### **3. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar suatu teori dan memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang mengikat berupa beberapa peraturan perundang-undangan dan putusan perceraian yang terdiri dari;

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

---

<sup>11</sup> Sunaryo, 1989, *Metode Research*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal: 29.

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- i) Putusan Perkara Cerai Talak No: 0302/Pdt.G/2011/Pa.Ska

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah-masalah mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Hukum ataupun Kamus Bahasa Indonesia.

## **b. Penelitian Lapangan**

### **1) Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini dapat lebih terarah. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surakarta karena di Pengadilan Agama Surakarta cukup banyak penanganan perkara tentang perkara perceraian dan yang menyangkut mengenai hak alimentasi anak/hak hadhanah, yang memungkinkan banyak pula problematika mengapa perkara itu banyak terjadi di Pengadilan Agama Surakarta, sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut sebagai objek penelitian.

### **2) Subjek Penelitian**

Yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah responden, dan dalam hal ini adalah Panmud Hukum dan Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer

yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

#### **b. Penelitian Lapangan**

- 1) Pengamatan (Observasi) adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan.<sup>12</sup>
- 2) Wawancara (interview) yaitu suatu proses tanya jawab dalam dua orang atau lebih secara baik, yang satu dan yang lain dapat mendengar dengan telinganya sendiri.<sup>13</sup> Wawancara dilaksanakan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden di Pengadilan Agama Surakarta.
- 3) Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>14</sup> Di dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Surakarta.

---

<sup>12</sup> Winarno Surtachmad, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito. Hal:162.

<sup>13</sup> Suharsini Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal: 10. Dan Hadi Sutrisno, 1984, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Hal: 192.

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal: 53.



- 4) Pengambilan *Sample* merupakan proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Pada penelitian ini, dalam hal penentuan *sample* menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas tujuan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah. Subjek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang mengetahui dan mengerti tentang permasalahan yang dikaji.

## 5. Metode Analisis Data

Berbagai data diperoleh dari studi kepustakaan berupa beberapa peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji dan literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan perceraian terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah serta putusan dalam perkara cerai talak, kemudian diadakan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) yaitu melalui tanya jawab dengan para responden di Pengadilan Agama Surakarta, selanjutnya dilakukan pengambilan *sample*. Teknis analisa data tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul disajikan dalam

bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
  - 1. Pengertian Perceraian

2. Sebab-sebab Perceraian

3. Tata Cara Perceraian

B. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah

1. Pengertian Tanggung Jawab Orang Tua dan Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah.

2. Bentuk Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah

C. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara Pada Peradilan Agama

a. Pengertian Hukum Acara Pengadilan Agama

b. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Memeriksa Perkara

c. Tata Cara Memasukkan Perkara ke Pengadilan Agama

d. Pemanggilan Para Pihak

e. Pemeriksaan dalam Sidang

f. Pembuktian

g. Pertimbangan Putusan

h. Putusan Hakim

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian.

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perceraian.
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan tanggung jawab orang tua terhadap hak alimentasi anak/hak hadhanah.

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**